

IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA CAGAR BUDAYA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KOTA PALEMBANG

Sutinah Andaryani, S.IP.,M.Si¹⁾, Ambarwati²⁾

^{1), 2)}Ilmu Administrasi Negara, STIA & P ADS

Jl. Puncak Sekuning No. 170 Palembang

Email : nanaberliandt@gmail.com¹⁾, wambar8897@gmail.com²⁾,

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Hasil penelitian menunjukkan tentang isi kebijakan yang terdiri dari enam indikator sebagai berikut, Pertama, kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Dinas Kebudayaan mengelola asset kebudayaan untuk lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum go to school, pameran - pameran, diskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat. Kedua, program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, pemasaran pariwisata dan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Ketiga, perubahan yang diharapkan yaitu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Keempat, program pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cagar budaya dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata. Kelima, kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas. Keenam, berkenaan dengan sumber daya, dilaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Dimana sarana dan prasarana ditingkatkan dan sumber daya aparturnya ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Ditinjau dari konteks kekuasaan dilihat dari tiga indikator. Pertama kekuasaan yang sifatnya lebih mengedepankan kepada tiga tugas pokok suatu lembaga yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepentingan dan strategi yang digunakan yaitu menciptakan beragam kemudahan masyarakat dalam mengkases cagar budaya dan kunjungan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operational prosedur yg telah ditetapkan. Ketiga, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerjanya, dan sekaligus sebagai system pengawasan dan evaluasi dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kerja, Minat Masyarakat, Cagar Budaya dan Museum

ABSTRACT

This study aimed to find out the implementation of the work program of the Department of Culture in increasing public interest in the Cultural Heritage of Sultan Mahmud Badaruddin II museum Palembang. This study applied a qualitative descriptive method with a case study design. The interview, observation and documentation were used in collecting data. The data analysis was carried out by using source triangulation techniques, methods and theories. The results of the study indicated that the content of the policy consisted of six indicators as follow, First, a policy implemented was the management of cultural diversity. The Department of Culture managed cultural assets in order to be accessible to the public such as, mobile museum activities, museum go to school, exhibitions, discussions. The discussions were needed to improve the history and culture literacy. Second, the work program implemented was the program of cultural value development, tourism promotion and tourism destination. In the context of development, it was defined as an increasing the potential value, information, and culture promotion and the utilization through research, revitalization, and adaptation. Third, the expected changes were the implementation of activities for the maintenance, preservation,

and protection of the heritage of cultural values, arts and historical and ancient heritages which were conducted integrately with the supports of relevant agencies continuously, and by considering development priorities. Fourth, the program of office administration service and partnership development by involving various related agencies. One of them was with the Department of Education and Tourism in the movement to provide education to the public about cultural heritage and make it as tourist destination. Fifth, activities were conducted to increase institutional capacity with proper function through improving the apparatus Human Resources. The goal of the activities were suitable institution with a proper function through qualified apparatus human resources. Sixth, in relation to resources, a program for providing facilities and infrastructure for the apparatus, and an education for human resources training was implemented so that the facilities and infrastructure were increased and the quality of the apparatus resources was improved through education and training. Furthermore, the context of power was judged from three indicators. First, the power was focused on the three main tasks of an institution: service, development and empowerment. The interest and strategies used were to create various facilities for the public to access the cultural heritage and visit with an affordable cost. Second, Department of Culture Service in Palembang had characteristics to provide services to the public with proper standard operating procedures. Third, a program of improve the development of the performance achievement reporting system to see how far Department of Culture had implemented the work program was conducted, and at the same time as a monitoring and evaluation system in the future.

Key words: Implementation, Work Program, Community Interest, Cultural Conservation and Museum

1. Pendahuluan

Sebuah kota biasanya memiliki sejarah yang berbeda satu sama lain. Ada cerita – cerita unik pada masing – masing daerah yang ada diberbagai wilayah tanah air. Sejarah dan cerita unik tersebut di abadikan dan disimpan secara apik pada suatu tempat khusus yang lazim kita dengar sebagai museum. Museum menurut Wikipedia, adalah [institusi](#) permanen, [nirlaba](#), melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada [masyarakat](#) untuk kebutuhan [studi](#), [pendidikan](#), dan kesenangan. Salah satu museum yang diambil sebagai lokasi penelitian yaitu museum yang terdapat di Kota Palembang.

Selanjutnya penulis mengambil Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang memiliki sejarah yang unik dan memiliki sebuah museum yang menyimpan napak tilas berdirinya suatu Kota. Kota Palembang adalah sebuah kota yang sangat kental dengan ragam kebudayaan dan juga unsur – unsur seni sebagai warisan budaya lokal dan Nasional di Indonesia. Kota Palembang sendiri memiliki ragam cagar budaya yang dilestarikan dan disimpan secara baik di sebuah museum.

Cagar budaya sendiri merupakan kebudayaan daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kondisi eksisting cagar budaya di kota Palembang berupa bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Dilihat dari beberapa kategori cagar budaya di kota Palembang di dominasi oleh bangunan cagar budaya yang di manfaatkan sebagai rumah tinggal, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan serta dimanfaatkan juga sebagai sarana rekreasi dan pemakaman. Adanya ragam cagar budaya tersebut diarsipkan dan didata secara lengkap pada museum yang ada di Kota Palembang

Berikut jumlah cagar budaya yang terdapat dan terdata di kota Palembang berdasarkan hasil survei lapangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Cagar budaya di kota Palembang

No	Kategori	Jml	Dokumentasi
1	Bangunan cagar budaya	164	
2	Struktur cagar budaya	31	
3	Situs cagar budaya	19	
4	Kawasan cagar budaya	2	
Jumlah		216	

Sumber : Museum Sultan Mahmud Badarudin II

Cagar budaya di kota Palembang berdasarkan hasil survey dilapangan terdapat 216 titik sebaran yang dirincikan berdasarkan nama objek cagar budaya.

1. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
2. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang

menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

3. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
4. Kawasan cagar budaya adalah ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Dengan banyaknya peninggalan kebudayaan yang ada maka Kota Palembang sangat membutuhkan sebuah museum yang mengelola kebudayaan tersebut dengan baik.

Kota Palembang memiliki sebuah museum tentang sejarah kebudayaannya yang bernama Sultan Mahmud Baddarudin II. Nama museum diambil dari nama Pahlawan asal Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II karena semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa dalam melawan penjajah.

Lokasi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang berada di seberang Sungai Musi ini memiliki bentuk asli bangunan tidak berubah dari masa awal pendiriannya. Lokasinya di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2, Palembang. Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II) terletak dikawasan Wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Bangunan megah berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter dan tinggi sekitar 17 meter, berarsitektur Eropa dibangun oleh kolonial Belanda mulai tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825. Bangunan ini sebelumnya dipakai sebagai rumah dinas Residen Belanda di Palembang. Sebelum bangunan yang sekarang menjadi museum ini didirikan sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau Sultan Mahmud Badauddin I sekitar tahun 1737 M.

Nama Sultan Mahmud Badaruddin II dijadikan nama museum ini untuk menghormati jasanya bagi kota Palembang. Museum ini berdiri di atas bangunan Benteng Koto Lama (Kuto Tengkuokato Kuto Batu) dimana Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1758) memerintah. Berdasarkan penyelidikan oleh tim arkeologis tahun 1988, diketahui bahwa pondasi Kuto Lama ditemukan di bawah balok kayu. Benteng ini pernah habis dibakar oleh Belanda pada 17 Oktober 1823 atas perintah I.L. Van Seven House sebagai balas dendam kepada Sultan yang telah membakar Loji Aur Rive. Kemudian di atasnya dibangun gedung tempat tinggal Residen Belanda. Pada masa Pendudukan Jepang, gedung ini dipakai sebagai markas Jepang dan dikembalikan ke penduduk Palembang ketika proklamasi tahun 1945.

Seiring dengan berjalan waktu dan dinamika sejarah yang terjadi di Kota Palembang, fungsi bangunan ini sudah silih berganti, mulai dari markas tentara jepang pada masa pendudukan, Teritorial Kodam II Sriwijaya

diawal kemerdekaan, beralih pengelolaan ke Pemerintah Kota Palembang sampai akhirnya menjadi museum.

Museum SMB II memiliki lebih dari 700 koleksi peninggalan sejarah dari zaman kesultanan Palembang Darussalam, koleksi tersebut di antaranya berupa uang, prasasti, naskah kuno, guci, kain dan pakaian tradisional, piranti saji, hiasan kamar pengantin, krism pedang serta senjata lainnya. Pentingnya informasi bagi masyarakat umum sebagai wahana yang memiliki peranan strategis terhadap penguatan identitas masyarakat. Kepedulian akan identitas masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan budaya beserta lingkungannya tercermin dari banyaknya minat masyarakat negara maju untuk mengunjungi museum. Tentunya kondisi tersebut tidak lepas dari peran para ahli kebudayaan yang meletakkan museum selain sebagai bagian dari pranata sosial, juga sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan pendidikan perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik.

Koleksi museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang terdiri dari arkeologika, etnografika, numismatika, biologika, kramalogika, seni rupa, dan histrotika dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Koleksi Museum SMB II

NO	KOLEKSI	JUMLAH
1	Arkeologika	11
2	Etnografika	209
3	Numismatika	173
4	Biologika	30
5	Kramalogika	217
6	Seni rupa	6
7	Historika	23
JUMLAH		669

Sumber : Museum Sultan Mahmud Badarudin II

Pengadaan koleksi museum Sultan Mahmud Badaruddin II diawali sekitar tahun 1984, bersamaan dengan di pindahkannya Museum Rumah Bari ke Museum Balaputra Dewa di perlintasan srijaya 1, KM 5,5 Palembang. Museum Rumah Bari yang permulaannya dikendalikan pemerintah kota Palembang untuk kepentingan yang lebih agung di pindahkan ke Museum provinsi Sumatera Selatan. Namun pemindahan tersebut tidak beserta koleksinya karena koleksi Museum Bari-lah yang menjadi cikal-bakal koleksi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, selain koleksi arca Buddha Siguntang yang terlebih dahulu dihalaman Museum SMB II. Museum ini menyimpan arca-arca lawas selain Ganesha, Amarawati dan Udha di era sriwijaya, berbagai macam perabot tradisional kesultanan Palembang serta sketsa yang menggambarkan perjuangan rakyat Palembang dalam usahanya.

Selanjutnya, berdasarkan data awal hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini, peran edukasi museum adalah untuk menyampaikan misi pendidikan mereka hanya kepada anak-anak, namun dengan

perubahan paradigma, maka saat ini museum juga harus dapat menyampaikan misi edukasinya itu kepada semua lapisan masyarakat.

Saat ini museum tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk mendidik masyarakat, tetapi menjadi tempat pembelajaran, yang termasuk di dalamnya tempat di mana pengunjung dapat memperoleh pengalaman serta informasi yang bermanfaat. Bila berbicara mengenai edukasi di museum, maka tidak dapat dipisahkan dari teori yang mendasarinya yaitu Teori edukasi yang terdiri atas teori belajar (*learning theories*) dan teori pengetahuan (*theories of knowledge*).

Peninggalan sejarah merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Adanya peninggalan sejarah, bangsa Indonesia dapat belajar dari kekayaan budaya masa lalu untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis yang harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia tetap terpelihara. Salah satu peninggalan bersejarah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yaitu Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Menurut hasil wawancara dan juga observasi langsung oleh peneliti, diketahui bahwa kurangnya media informasi mengenai museum tersebut berdampak pada sikap masyarakat sekitar maupun pengunjung untuk menjaga kelestarian dan kebersihan disekitar museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya inilah, citra museum masih dianggap membosankan dan tidak menyenangkan serta apresiasi masyarakat kepada museum masih kurang, serta belum adanya kesadaran masyarakat dan komunitas-komunitas yang menganggap Museum ini tertutup dan beranggapan jika ingin melakukan kerjasama untuk edukasi atau apapun kegiatannya itu banyak komunitas yang kadang merasa dipersulit, hal ini berdasarkan pendapat pengelola Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Disinilah pentingnya bagi Museum dalam menerapkan upaya dan strategi dalam menyampaikan pesan edukasinya kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan dan dilihat untuk masa kedepannya.

Selain itu, peran pemerintah dan masyarakat serta seniman perlu ditingkatkan guna mencegah generasi muda yang telah termakan oleh arus modernisasi budaya barat. Pengenalan akan sejarah dan budaya tradisional harus dilakukan sejak dini. Serta mampu meningkatkan minat masyarakat pada cagar budaya. Mengingat hal penting tersebut maka dibutuhkan ulasan rinci mengenai implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada salah satu cagar budaya di Kota Palembang yaitu Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang dalam hal ini menitikberatkan pada strategi dalam menyampaikan pesan edukasi dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misal pejabat, kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan

tertentu. Menurut Charles O Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yg sangat berbeda istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standard, proposal dan grand design. Selain itu kebijakan publik menurut Thomas R Dye mengatakan bahwa public policy is whatever the government choose to do or not to do (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Dewi, 2016: 15).

Selanjutnya Implementasi Kebijakan menurut Aneta (2010 : 55) pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mempelajari implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan. Implementasi kebijakan public merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta diterima oleh public.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) berkaitan dengan upaya mencapai tujuan tertentu, pada dasarnya tahap ini berhubungan dengan cara kerja Pemerintah. Karena makna dan sifat implementasi dapat dipahami dari berbagai dimensi, tahap ini menunjukkan signifikasinya. Pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Dewi, 2016 : 29)

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua jenis teknis atau model implementasi kebijakan. Pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus “dari bawah ke atas” (*bottom-topper*), dan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Namun secara umum, model implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli dipandang lazim yaitu model *top-down* dan *bottom-up*. Model *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya model *bottom-up* bermaksa meski kebijakan dilihat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara keduanya ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk Implementasi Program Kerja Program Kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang digunakanlah model kebijakan Merille S. Grindle.

Merille S.Grindle (dalam dewi, 2016 : 39) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya yang didukung oleh program aksi proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Indikator isi kebijakan menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Content of Policy menurut Grindle :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.
 - d. Letak pengambilan keputusan.
 - e. Pelaksana program.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan.
2. Context of Policy menurut Grindle :
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

2. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007, maka dalam hal ini dinas kebudayaan mempunyai program kerja sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi dan perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas SDM kebudayaan
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
5. Program pengembangan pemasaran pariwisata
6. Program pengembangan destinasi pariwisata
7. Program pengembangan kemitraan
8. Program pengelolaan keragaman budaya
9. Program pengelolaan kekayaan budaya.
10. Program permuseuman dan nilai-nilai budaya sukses.
11. Program pengembangan nilai budaya.

Selanjutnya untuk pembahasan Implementasi Program kerja jika ditinjau dari sudut pandang teori Grindle adalah sebagai berikut :

1. Content of Policy/ indikator isi kebijakan
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan - kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk kepentingan yg dipengaruhi merupakan tindakan pemerintah merupakan upaya untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang. Dinas Kebudayaan kota Palembang mengambil suatu tindakan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan, dalam hal ini membuat dan melaksanakan program kerjanya, untuk mengenalkan salah satu cagar budayanya ke masyarakat.

Salah satu program kerjanya yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Pariwisata budaya merupakan salah satu sektor wisata yang banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah akhir - akhir ini, dimana dalam pariwisata budaya ini wisatawan akan dipandu untuk disamping mengenali sekaligus memahami budaya dan kearifan pada Lembaga Adat dan Dewan Pembina Adat Kota Palembang. Disamping itu,

pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan, tempat - tempat bersejarah sekaligus museum, representasi nilai dan sistem hidup masyarakat lokal, seni (baik seni pertunjukan atau pun seni lainnya), serta kuliner khas dari masyarakat asli atau masyarakat lokal yang bersangkutan.

Selanjutnya pewarisan kebudayaan sendiri dapat dilakukan dengan sarana pendidikan, baik formal, maupun nonformal. Agar tradisi kebudayaan tetap hidup dan berkembang setiap masyarakat dapat mewariskannya kepada generasi yang lebih muda melalui pendidikan. Namun dalam konteks kebudayaan banyak orang mempertanyakan pendidikan kita. Hal ini dilakukan Dinas kebudayaan Palembang dengan cara memaksimalkan fungsi edukasi museum dengan menggecarkan kegiatan - kegiatan yang lebih dekat ke publik. Contoh kegiatan lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum *go to school*, pameran - pameran, diskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat sekaligus mendekatkannya pada museum. Setidaknya terdapat 5 museum besar si Palembang, yakni Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Museum Monpera dan Museum swasta A.K Gani, museum-museum tersebut perlu membuka diri menjadi ruang publik yang inklusif.

Adapun strategi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dalam menyampaikan pesan edukasinya adalah yang pertama dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten seperti *Tour Guide* yang dapat menjelaskan sejarah dari koleksi - koleksi yang ada di Museum. Kedua bekerjasama dengan universitas atau sekolah yang ingin melakukan kerja praktek ataupun pelatihan di Museum. Selain itu ada pula bantuan dari Mahasiswa magang yang membuat Media Sosial yang dikelola oleh Mahasiswa magang itu sendiri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Museum, mereka membantu menginformasikan kepada masyarakat perkembangan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II mengenai apa saja kegiatannya, hal ini pun secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan *awarness* (kesadaran) bahwa kota Palembang memiliki Museum yang menggambarkan sejarah budaya kota Palembang.

Dengan demikian, museum tidak terkesan hanya sebatas ruang penyimpanan benda - benda sejarah dan cenderung bergerak pasif. Lebih dari itu, museum harus aktif menyampaikan pesan agar generasi penerus menjaga aset sejarah yang ada. Untuk membuat program dekat ke publik semakin luas, Dinas Kebudayaan juga berencana mengangkat bangunan - bangunan bersejarah di Kota Palembang sebagai galeri atau museum yang mewakili sejarah dan identitas lokal. Bangunan ini seperti Rumah Kampung Kapitan, Rumah Kampung Al - Munawar, Kantor Ledeng dan Pabrik Es Assegaf.

Palembang yang merupakan kota tertua di Indonesia yang berusia 1336 tahun memiliki potensi besar menjadi kawasan wisata sejarah, budaya, selagi semua pihak memberi perhatian optimal, seperti dengan

kegiatan bersama - sama memelihara benda dan bangunan bersejarah.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Pada point ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dalam mengimplementasikan kebijakan yang hendak dilaksanakan. Tipe manfaat, berkaitan dengan tingkat perubahan perilaku yg dikehendaki. Dalam hal ini pemerintah mengindahkan perubahan perilaku dr masyarakat dari pasif menjadi aktif untuk mengunjungi cagar budaya museum sultan mahmud badaruddin II Palembang.

Untuk indikator kedua, program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan yang hasilnya untuk pemeliharaan budaya.

Selain itu untuk pemasaran pariwisata cagar budaya yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan kunjungan konsumen wisatawan atau upaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu pemasaran harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.

Selanjutnya melihat keadaan sektor pariwisata di Kota Palembang yang mempunyai objek wisata yang menjanjikan maka perlu adanya pengembangan di sektor pariwisata. Dengan adanya promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menjadikan Kota Palembang lebih berkembang. Serta dikenal oleh masyarakat Indonesia hingga mancanegara sehingga tempat - tempat wisata di Kota Palembang tidak hanya ramai pada saat ada event - event tertentu saja, namun pada hari biasa pun para wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kota Palembang. Kota Palembang mempunyai empat jenis objek wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata sejarah.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Pada point ini dijelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan. Hal ini dapat berupa tingkat perubahan yg diinginkan, implementasi program dirancang untuk mencapai sasaran yg luas baik jangka panjang maupun jangka pendek. Seperti salah satu programnya yaitu program permuseuman dan nilai-nilai budaya sukses, dimana Dinas kebudayaan merancang program ini dan melaksanakannya untuk capaian sasaran

seluruh lapisan masyarakat berbagai tingkatan usia, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Serta capaian tujuan utama dari program kerjanya yaitu menumbuhkan minat masyarakat kepada salah satu cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai program jangka panjang.

d. Letak pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada point ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan yang berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. salah satu butir program dinas kebudayaan yaitu program pelayanan administrasi perkantoran dan pogram pengembangan kemitraan.

Sasaran program pelayanan administrasi perkantoran adalah kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor. Pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik. Dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan merupakan pengambil keputusan dalam kebijakan apapun yang ada didalam organisasinya. Seperti salah satunya yaitu menetapkan SOP terhadap pelayanan administrasi yang bersinggungan langsung dengan publik terutama pada aturan yang diberlakukan untuk internal organisasi.

Selain itu Kepala Dinas Kebudayaan juga sebagai pengambil keputusan yang berkenaan dengan pengembangan kemitraan dengan melibatkan sebagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cagar budaya dan menjadikan cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai salah satu destinasi wisata.

e. Pelaksana program.

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Untuk pelaksana program, pada kenyataannya semakin banyak organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pelaksanaan semakin rumit. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Palembang melibatkan banyak organisasi dalam pelaksanaan programnya mempunyai strategi jitu agar programnya dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan instansi dan komponen yang menjadi mitra kerja. Sekaligus mempersiapkan sumber daya yang kompeten sebagai pelaksana dari program kerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pelayanan dan informasi edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga sumber daya yang ada merupakan sumber daya yang terampil, berintelektual tinggi dan professional.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya yg dilibatkan, perbedaan kondisi sumber daya setiap organisasi menyebabkan perbedaan hasil implementasi kebijakan. Berkenaan dengan sumber daya, salah satu program yg laksanakan oleh dinas Kebudayaan Kota Palembang yaitu penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia.

Untuk mempersiapkan sumber daya yang siap dalam mnerikan edukasi kepada warga masyarakat, semua sumber daya diberikan bekal mengenai teknik penyampaian dan sosialisasi mengenai cagar budaya selain itu juga diberikan pelatihan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang baik.

Selain itu Dinas Kebudayaan melakukan pembenahan dan mempersiapkan sumber daya yang lain yaitu sarana dan prasarana. Maksud dan tujuan dari penyediaan sarana dan prasarana aparatur adalah untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi. Sasaran kegiatan adalah penyediaan sarana prasarana kantor layak fungsi. Fasilitas bangunan di samping gedung SMB II digunakan untuk kantor Dinas Kebudayaan, selain itu juga ada taman terbuka, halaman depan, tempat parker museum, musholla, dan toilet.

2. Context of Policy menurut Grindle :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Untuk hal ini Dinas Kebudayaan Kota Palembang yg dikepalai oleh Kepala Dinas memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengambil keputusan yang kongkrit mengenai kebijakan dalam mengelola cagar budaya yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kebudayaan.

Hal ini dipertegas dengan penjelasan bahwa Dinas Kebudayaan dalam masyarakat terdapat tiga tugas pokok lembaga Negara yang diperlukan agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan. ketiga tugas ini dapat dikatakan sebagai misi masyarakat yaitu :

1. Tugas Pelayanan (publik)

Tugas pelayanan yaitu memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan - bedakan kelompok dan

diberikan secara cuma - cuma atau dengan biaya yang terjangkau oleh kelompok yang tidak mampu. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan memberikan pelayanan public pada suatu cagar budaya dapat diberikan secara gratis atau dengan biaya terjangkau oleh kelompok yang tidak mampu.

Untuk operasional Museum Sultan Mahmud Badaruddin II buka setiap hari, dengan jam operasional hari Senin mulai pukul 13.00-15.00 WIB, Selasa-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB, dan Sabtu-Minggu pukul 09.00-15.00. Harga tiket masuknya pun terjangkau, yaitu untuk pelajar dikenakan tarif hanya Rp 1000,-, mahasiswa Rp 2000,- dan umum Rp 5000,-, sementara untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp 20.000,- tarif ini sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sehingga merupakan baiaya yang cukup terjangkau untuk semua kelompok masyarakat.

2. Tugas Pembangunan,

Tugas Pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus pada upaya membangun produktivitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yaitu membuat souvenir dan oleh oleh khas Kota Palembang yg dapat dijual disekitar cagar budaya museum Sultan Mahmud Badaruddin II

3. Tugas Pemberdayaan

Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. tugas inu adalah tugas yang non profit. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan dan menawarkan serta mengkespose cagar budaya menjadi salah satu destinasi wisata pilihan dengan membagikan foto dan kegiatan yang dilakukan di cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II pada media sosial masyarakat masing – masing.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik lembaga dan penguasa, dalam hal inu karakteristik lembaga publik khususnya Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operational prosedur yg ditetapkan oleh menpan dan Dinas Kebudayaan sendiri

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu

kebijakan. kepatutan daya tanggap dalam hal ini akan ada dampak dari pelaksanaan program kerja yang ada, saat bersinggungan dengan pelayanan terhadap publik tentu saja erat kaitannya dengan pengaduan dan juga komplain dari warga masyarakat yg menerima pelayanan publik.

Salah satu program kerja Dinas Kebudayaan yaitu program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan terselesainya dokumen penyelenggaraan pemerintah (dokumen perencanaan) tepat waktu. Sasaran kegiatan adalah dokumen penyelenggaraan pemerintah (dokumen perencanaan) yang disusun tepat waktu. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jalan nilai kepatuhan pada program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh pelaksana suatu kebijakan. Selai itu untuk Dinas sendiri memiliki sebuah lembaga yang bertugas untuk mengukur sejauh mana pencapaian keberhasilan Dinas dalam menjalankan program kerjanya. Ada proses evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan sehingga program tersebut dapat diawasi dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan Program kerja yang telah dibuat Dinas Kebudayaan telah dilaksanakan dengan baik sebagai upaya meningkatkan minat terhadap cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, dengan indikator sebagai berikut :

1. Isi kebijakan yang terdiri dari enam indicator sebagai berikut :
 - a. Kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Dinas Kebudayaan mengelola asset kebudayaan untuk lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum *go to school*, pameran - pameran, diskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat.
 - b. Program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, pemasaran pariwisata dan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
 - c. Perubahan yang diharapkan yaitu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
 - d. Program pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

cagar budaya dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata.

- e. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas.
 - f. Berkenaan dengan sumber daya, dilaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Dimana sarana dan prasarana ditingkatkan dan sumber daya aparaturnya ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Ditinjau dari konteks kekuasan dilihat dari tiga indikator, yaitu :
- a. Kekuasaan yang sifatnya lebih mengedepankan kepada tiga tugas pokok suatu lembaga yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepentingan dan strategi yang digunakan yaitu menciptakan beragam kemudahan masyarakat dalam mengakses cagar budaya dan kunjungan dengan biaya yang terjangkau.
 - b. Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operasional prosedur yg telah ditetapkan.
 - c. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerjanya, dan sekaligus sebagai system pengawasan dan evaluasi dimasa yang akan datang.

Selanjutnya saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Untuk program kerja yang telah dilaksanakan dengan baik agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi
2. Agar sarana dan prasara yang ada ditingkatkan lagi agar pengunjung dapat merasa nyaman untuk melakukan kunjungan wisata
3. Menggalakkan masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam mempromosikan cagar budaya agar dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Kota Palembang.

Daftar Pustaka

- abdiprojo. *Model-Model Implementasi Kebijakan Publik" (On-Line)*, tersedia di : abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-Implementasi-kebijakan_05.html (5 April 2010)
- Aneta, Asna. 2010. *"Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo"*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No. 1 (diakses pada Maret 2010), h.55.
- Dewa, Ratu. 2020. *Palembang Djaja. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Palembang*. Palembang
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Dinas Kebudayaan Kota Palembang. 2020. *Laporan Antara " Pembuatan Database Cagar Budaya*

- Berbasis Data Spasial Kota Palembang*.
Palembang.
- Dinas Kebudayaan, Kota Palembang. 2019. "Rencana Strategi Tahun 2018-2023". Palembang.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Museum>
- Nasrudin, Endin. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Setia. Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.